

## PERAN PEREMPUAN DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA

**Fatia Azuhra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Sejarah, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia

\*Corresponding author: [fatiaazuhra@gmail.com](mailto:fatiaazuhra@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study explores the role of women in Indonesia's struggle for independence, focusing on their active contributions that have often been marginalized in official national historiography. Using a qualitative approach and historical method, this research traces women's involvement in various forms of resistance, including direct combat, education, socio-political organizations, and strategic domestic efforts during the colonial era. Figures such as Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Malahayati, and Martha Christina Tiahahu exemplify women's leadership and bravery in physical resistance against colonial powers. Moreover, women also played a crucial role in fostering national consciousness through media, women's organizations, and grassroots education. The findings reveal that women were not merely supporters but active agents in the independence movement. This research also highlights the patriarchal bias in Indonesian historical writing and stresses the importance of incorporating gender perspectives to create a more inclusive and balanced historical narrative.*

**Keywords:** *women, independence struggle, history, colonialism, gender, nationalism*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan fokus pada kontribusi aktif mereka yang seringkali terpinggirkan dalam historiografi nasional resmi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode historis, penelitian ini menelusuri keterlibatan perempuan dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk pertempuran langsung, pendidikan, organisasi sosial-politik, dan upaya domestik strategis selama era kolonial. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Malahayati, dan Martha Christina Tiahahu menjadi contoh kepemimpinan dan keberanian perempuan dalam perlawanan fisik terhadap kekuatan kolonial. Selain itu, perempuan juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional melalui media, organisasi perempuan, dan pendidikan akar rumput. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan bukan hanya pendukung, tetapi agen aktif dalam gerakan kemerdekaan. Penelitian ini juga menyoroti bias patriarkal dalam penulisan sejarah Indonesia dan menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender untuk menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan seimbang.

**Kata kunci:** perempuan, perjuangan kemerdekaan, sejarah, kolonialisme, gender, nasionalisme

## 1. Pendahuluan

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan cerminan dari semangat kolektif seluruh rakyat dalam melawan penindasan kolonial yang telah berlangsung selama lebih dari tiga abad. Dalam proses panjang tersebut, masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang—baik etnis, agama, kelas sosial, maupun gender bersatu demi satu tujuan besar: mencapai kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan bangsa. Meskipun demikian, dalam narasi besar sejarah nasional yang selama ini tertulis dan diajarkan, peran dan kontribusi perempuan sering kali tidak mendapatkan porsi yang seimbang jika dibandingkan dengan peran laki-laki. Sejarah resmi lebih banyak menampilkan sosok-sosok pejuang laki-laki sebagai aktor utama dalam perjuangan, sementara kiprah perempuan kerap dilupakan atau disebut sekilas tanpa pendalaman (Iriansyah, 2017).

Padahal, perempuan Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai bentuk perjuangan kemerdekaan, bahkan sejak masa perlawanan awal terhadap kolonialisme. Keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat simbolis atau domestik, tetapi menyentuh langsung pada aspek-aspek strategis perjuangan. Banyak di antara mereka yang secara aktif berpartisipasi dalam perang gerilya, menjadi mata-mata, penghubung logistik, perawat, pengajar di sekolah-sekolah rakyat, hingga menjadi pemimpin gerakan perempuan dan organisasi sosial-politik yang memperjuangkan kemerdekaan. Sosok-sosok seperti Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia di Aceh, Martha Christina Tiahahu di Maluku, hingga Dewi Sartika dan Kartini di Pulau Jawa, menjadi ikon perjuangan yang membuktikan bahwa perempuan Indonesia mampu mengambil peran aktif dalam dinamika politik dan militer pada masa kolonial (Huda & Dodi, 2020).

Selain tokoh-tokoh yang tercatat dalam sejarah resmi, banyak perempuan yang berjuang dalam diam atau secara kolektif tanpa nama yang tercatat, namun peran mereka sangat menentukan keberlangsungan perjuangan di berbagai daerah. Mereka menyembunyikan para pejuang dari kejaran penjajah, menyediakan makanan dan obat-obatan, bahkan mengangkat senjata ketika diperlukan. Dalam konteks ini, perjuangan perempuan tidak hanya berarti keterlibatan fisik, tetapi juga menyangkut perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan peneguhan identitas nasional. Perjuangan mereka adalah bagian dari upaya membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menantang konstruksi sosial yang membatasi perempuan hanya pada ruang domestik.

Keterlibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan juga menandakan adanya kesadaran politik dan nasionalisme yang tinggi di kalangan perempuan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika, Kongres Perempuan Indonesia, dan bagian perempuan dari organisasi besar seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia menjadi wadah bagi perempuan untuk menyuarakan hak-haknya serta menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam perjuangan nasional. Munculnya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga memperjuangkan emansipasi, pendidikan, dan hak-hak sosial lainnya (Sari & Andi, 2024).

Namun, meskipun kontribusinya besar dan nyata, representasi perempuan dalam historiografi Indonesia masih terbatas. Penulisan sejarah selama ini lebih bersifat patriarkal dan kurang memberi ruang bagi narasi-narasi alternatif yang menempatkan perempuan sebagai subjek sejarah. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang bertujuan merekonstruksi peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh, adil, dan berimbang mengenai sejarah bangsa (Kiftiyah, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, dengan pendekatan historis dan gender. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi tokoh dan peran-peran perempuan yang telah terlibat dalam perjuangan, tetapi juga menelaah bagaimana konstruksi sosial, budaya, dan politik pada masa kolonial memengaruhi ruang gerak perempuan serta bagaimana perempuan menanggapi kondisi tersebut melalui perlawanan aktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sejarah Indonesia serta membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai pentingnya perspektif gender dalam penulisan sejarah nasional.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis untuk mengkaji peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Metode historis dipilih karena memungkinkan penelusuran secara sistematis terhadap fakta-fakta masa lalu yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam berbagai lini perjuangan. Proses penelitian ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder, seperti dokumen arsip, surat kabar zaman kolonial dan revolusi, biografi tokoh perempuan, notulen kongres perempuan, serta karya-karya ilmiah terdahulu yang membahas topik ini.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Pada masa pendudukan Jepang wanita tidak banyak memperoleh kesempatan, karena setiap gerak selalu mendapat pengawasan yang ketat dari kempetai Jepang. Untuk mengikuti kehendak Pemerintahan Jepang maka ketika didirikan Gerakan Tiga A dibentuk pula gerakan Istri Tiga A dengan pimpinannya Ny. Artinah Syamsuddin. Gerakan tersebut dilengkapi dengan bagian puteri, yang dinamakan Barisan Putri Asia Raya. Dengan dibentuknya PUTERA pada bulan Maret 1943, dibentuk pula barisan pekerjaan perempuan PUTERA, bagian dari wanitanya (Manus & Nurliana, 1985, p. 84).

Disamping gerakan itu, pemerintah Jepang mendirikan Fujinkai (Organisasi Wanita) yang kedudukannya khusus menampung segala bentuk kegiatan wanita. Fujinkai didirikan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah dan namanya sesuai dengan tingkat dan tempat kedudukannya, seperti ken untuk tingkat kabupaten dan si untuk kota. Adapun pemimpin dari

perkumpulan ini adalah istri-istri dari kenko (bupati). Dengan demikian Fujinkai merupakan suatu keharusan bagi ibu-ibu atau para pamong praja mulai dari tingkat atas sampai ke wilayah kecamatan-kecamatan. Anggota-anggotanya wajib menggerakkan tenaga-tenaga kaum wanita di tempat masing-masing, sedangkan yang turut menjadi anggota adalah anak gadis berumur 15 tahun ke atas (Manus & Nurliana, 1985).

Pada tahun 1920-an, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia perempuan bergerak di sekitar kepentingan gender mereka. Mereka mengambil bentuk masalah sosiokultural perempuan, dan mengorganisasi diri diatas dasar keagamaan dan daerah serta gerakan politik yang penting saat itu. Berbagai sekolah perempuan didirikan dan sejumlah majalah diterbitkan, serangkaian aksi atas nama perempuan buruh dan berbagai komunitas perempuan pun dilancarkan. Organisasi formal perempuan pertama ialah Poetri Mardika, yang didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar tampil di depan umum, membuang rasa “takut”, dan “mengangkat” perempuan ke kedudukan yang sama dengan laki-laki. Disamping itu antara tahun 1913-1915 berbagai organisasi perempuan, terutama di Jawa dan di Sumatera berdiri, yang anggotanya sebagian besar dari golongan bangsawan. Setelah mengalami proses transformasi, gerakan perempuan mengkristal menjadi Kesadaran politik, seperti yang dinyatakan pada Kongres I Wanita tanggal 22 Desember 1928, dimana mereka menyatakan bahwa persamaan derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjajah. Kongres ini menandai sejumlah pergeseran penting, dalam cara-cara kaum perempuan Indonesia merumuskan interes gender mereka. Pada tahun 1940 serikat buruh perempuan pertama dibentuk, yaitu Pekerja Perempuan Indonesia. Yang tujuan utamanya adalah memberikan latihan kerja. Namun organisasi ini pun melakukan perlawanan terhadap diskriminasi dalam kenaikan pangkat dan upah. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang membubarkan semua organisasi perempuan yang sudah ada sebelum perang dibubarkan kecuali yang sengaja dibuat Jepang untuk kepentingan perangnya seperti Fujinkai (Nurliana et al., 1986).

Tujuan umum dari Fujinkai adalah untuk memobilisasi tenaga kerja perempuan guna mendukung tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah yang dijajah Jepang selama Perang Dunia II, banyak perempuan yang dijadikan jugun ianfu perempuan penghibur yang mengikuti angkatan bersenjata Jepang. Dengan sembunyi-sembunyi mereka bisa menyiapkan perjuangan kemerdekaan, tetapi mereka tidak bisa memprotes kebobrokan ekonomi yang ditimbulkan Jepang atau terhadap berbagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan para serdadu Jepang. Pada masa perang kemerdekaan ini banyak perempuan yang tampil di barisan depan bersama dengan pejuang yang lain. Satuan-satuan perempuan perjuangan berdiri dimana-mana, seperti Lasywi (Lasykar Wanita Indonesia). Di garis belakang perempuan juga mengorganisasi diri. Setelah proklamasi Kemerdekaan RI 1945, Fujinkai dibubarkan, bahkan ketua Fujinkai menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk mengubah organisasi-organisasi lokal menjadi organisasi yang bisa bekerja mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini kemudian melebur menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwani. Disamping itu berdiri

pula sebuah organisasi buruh perempuan berhaluan kiri, hasil fusi dari beberapa organisasi buruh perempuan yang bernama Barisan Buruh Wanita (Ohorella et al., 1992).

Salah satu bentuk nyata dari keterlibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan adalah melalui partisipasi langsung dalam medan pertempuran. Sejarah mencatat beberapa tokoh perempuan yang memimpin pasukan atau terlibat dalam perlawanan gerilya melawan penjajah. Di Aceh, Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia adalah dua sosok perempuan pejuang yang tidak hanya mendampingi suami mereka dalam perang, tetapi juga mengambil alih kepemimpinan setelah para suami gugur di medan laga. Cut Nyak Dhien, misalnya, dikenal karena strategi gerilyanya yang efektif dan semangat juangnya yang tidak padam meskipun usia dan penyakit mulai melemahkan tubuhnya. Demikian pula Laksamana Malahayati, perempuan Aceh yang mencapai pangkat laksamana dan memimpin armada laut Kesultanan Aceh melawan Belanda pada akhir abad ke-16. Ia memimpin pasukan perempuan yang disebut Inong Balee yang terdiri dari para janda pejuang dan berhasil menorehkan kemenangan-kemenangan strategis yang tidak hanya berarti secara militer, tetapi juga simbolis: bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin dalam peperangan. Di Maluku, Martha Christina Tiahahu menjadi contoh nyata keterlibatan anak perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Ia turun langsung ke medan perang bersama ayahnya dan memilih untuk tidak tunduk kepada penjajah meskipun usianya masih sangat muda. Kisah heroik perempuan-perempuan ini bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari sejarah panjang keterlibatan perempuan dalam perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah (Sondarika, 2017).

Selain dalam medan perang, perempuan juga memainkan peran penting dalam dunia organisasi dan pergerakan nasional. Di awal abad ke-20, ketika semangat nasionalisme mulai tumbuh dan organisasi modern bermunculan, perempuan mulai mengambil peran dalam ruang-ruang diskusi, organisasi sosial-politik, dan gerakan emansipasi. Mereka mulai menyuarakan hak untuk berpendidikan, hak untuk bersuara di ruang publik, serta hak untuk berperan dalam penentuan nasib bangsa. Organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912), Aisyiyah (1917), Wanita Utomo, dan banyak organisasi lokal lain menjadi wadah pembentukan kesadaran politik perempuan. Mereka mengadakan kursus, pelatihan, diskusi, dan penerbitan majalah yang menyebarkan gagasan-gagasan kebangsaan dan emansipasi. Para tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan Siti Walidah (istri pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan) memainkan peran besar dalam membuka akses perempuan terhadap pendidikan, serta mendorong perempuan untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam masyarakat.

Puncak dari kesadaran kolektif ini terlihat dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres ini tidak hanya menjadi simbol kebangkitan gerakan perempuan, tetapi juga momentum konsolidasi perjuangan kaum perempuan dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial. Dalam kongres tersebut, para perempuan mendiskusikan isu-isu penting seperti pernikahan anak, pendidikan, kesetaraan hak, dan tentu saja kemerdekaan bangsa. Kongres ini membuktikan bahwa perempuan tidak berada di

pinggiran perjuangan, melainkan berada di jantung diskusi-diskusi penting dalam proses kebangsaan (Indah, 2013).

Peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan juga sangat tampak dalam sektor sosial dan budaya. Perempuan menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan informal di dalam keluarga dan komunitas. Ibu-ibu mendidik anak-anak mereka dengan cerita-cerita heroik tentang perjuangan, mengajarkan nilai keberanian, solidaritas, dan cinta tanah air. Mereka mengajarkan lagu-lagu perjuangan, doa-doa untuk kemerdekaan, dan menanamkan identitas nasional sejak usia dini. Bahkan dalam kondisi perang dan pengungsian, perempuan tetap menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Mereka memasak untuk pasukan, menjahit bendera, menjadi penghubung antara pejuang dan rakyat, bahkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting negara. Mereka bekerja di belakang layar, tetapi peran mereka sangat vital untuk kelangsungan perjuangan.

Di sisi lain, perempuan juga hadir dalam peran intelektual. R.A. Kartini adalah simbol perempuan intelektual yang meskipun tidak mengangkat senjata, tetapi berkontribusi besar melalui gagasan. Surat-suratnya menjadi refleksi kesadaran kritis perempuan atas ketertindasan, baik oleh adat maupun kolonialisme. Gagasan-gagasannya kemudian dibukukan dan menginspirasi gerakan pendidikan perempuan di Indonesia. Begitu pula dengan Dewi Sartika, yang mendirikan sekolah perempuan di Bandung jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan dan kemerdekaan, bukan hanya untuk bangsa, tetapi juga untuk perempuan. Melalui sekolah-sekolah inilah muncul generasi perempuan terpelajar yang kemudian menjadi motor penggerak dalam perjuangan nasional (Indarti, 2019).

Pada masa revolusi fisik (1945–1949), perempuan memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Mereka menjadi bagian dari badan-badan perjuangan seperti Palang Merah Indonesia, Laskar Wanita Indonesia (LASWI), dan berbagai organisasi lokal yang bertugas menyediakan logistik, menjadi kurir rahasia, pengumpul informasi, dan tenaga medis. Perempuan-perempuan di desa menyuplai makanan dan menyembunyikan pejuang yang sedang diburu oleh Belanda. Di kota-kota, para pemuda menjadi penghubung antarunit gerilya dan relawan yang menyebarkan selebaran perjuangan, menulis berita-berita kemerdekaan secara sembunyi-sembunyi, dan menjadi mata-mata untuk pejuang republik. Meskipun peran mereka tak selalu terdokumentasi dengan baik, namun pengakuan terhadap kerja-kerja perempuan ini mulai diangkat dalam sejarah lisan dan karya-karya akademik feminis. Sebuah hal yang menjadi penting agar sejarah tidak hanya ditulis dari sudut pandang laki-laki, tetapi juga menghargai kontribusi nyata kaum Perempuan (Erick & Masyitah, 2020).

Salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah minimnya pengakuan historis terhadap peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Narasi sejarah yang ditulis secara patriarkal cenderung meminggirkan peran perempuan dan hanya menonjolkan tokoh-tokoh laki-laki sebagai pahlawan utama. Nama-nama seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir memang memiliki posisi penting, tetapi peran perempuan sering kali dilupakan atau hanya disebut

sepintas. Padahal, kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil kerja satu dua tokoh, tetapi hasil dari perjuangan kolektif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Oleh karena itu, reinterpretasi sejarah dengan pendekatan gender menjadi hal yang sangat penting. Penulisan sejarah perlu membuka ruang bagi suara-suara perempuan, baik yang tercatat dalam dokumen resmi maupun yang hidup dalam narasi lisan Masyarakat (Erick & Masyitah, 2020).

#### **4. Simpulan dan Saran**

Perempuan Indonesia memainkan peran yang sangat penting dan beragam dalam perjuangan kemerdekaan, baik dalam bentuk perlawanan bersenjata, pemikiran intelektual, pendidikan, organisasi sosial-politik, maupun dukungan logistik dan diplomatik. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dhien, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan banyak lainnya menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga pelaku utama dalam membentuk arah perjuangan bangsa. Keterlibatan mereka tidak lepas dari semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya keadilan serta kedaulatan. Meskipun demikian, kontribusi besar perempuan kerap kali tersisih dalam narasi historiografi nasional yang lebih dominan mengangkat tokoh laki-laki. Oleh karena itu, sudah saatnya sejarah perjuangan Indonesia ditulis dan dipahami secara lebih inklusif, dengan memberikan ruang yang adil bagi perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses kemerdekaan.

### Daftar Pustaka

- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200–212.
- Huda, H. D., & Dodi, L. (2020). *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press.
- Indah, I. (2013). Peran-peran perempuan dalam masyarakat. *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 28495.
- Indarti, S. H. (2019). Peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).
- Iriansyah, H. S. (2017). Tantangan dan peluang perempuan dalam berpolitik di Indonesia: Masyarakat patriarki. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1–14.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13.
- Manus, M. P. B., & Nurliana, N. (1985). *Peranan wanita Indonesia di masa perang kemerdekaan, 1945-1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai.
- Nurliana, N., Manus, M. P. B., Ohorella, G. A., & Irsyam, T. W. (1986). *Peranan wanita Indonesia di masa perang kemerdekaan 1945-1950*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ohorella, G. A., Sutjiatiningsih, S., & Ibrahim, M. (1992). *Peranan wanita Indonesia dalam masa pergerakan nasional*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Sari, W. P., & Andi, A. (2024). Representasi Peran Wanita pada Buku Teks Pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI SMA. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 8(2), 301–313.
- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Historia: Jurnal Pembelajaran Sejarah Dan Sejarah UM Metro*, 5(2), 207–217.